



## **OPTIMALISASI APLIKASI PPID DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN**

**Agung Nurrahman<sup>1,3</sup>, Sabaruddin Sabaruddin<sup>1</sup>, Rofingatun Nur Laila Salma<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<sup>2</sup>Pemerintah Kabupaten Kebumen

<sup>2</sup>corresponding author: [anagoenx@gmail.com](mailto:anagoenx@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to obtain a general description of the optimization of the Information and Documentation Management Officer (PPID) application in improving public information services at the Kebumen District Communication and Informatics Service. The research method is descriptive qualitative. The method of buying informants is purposive sampling. The results of the study show that the purpose of the PPID application is to facilitate public information services, especially to the people of Kebumen Regency so that transparency/openness of government information will be created. Another finding is that the Kebumen Diskominfo does not yet have its own programmer. This is an obstacle because if you continue to invite programmers from outside the Diskominfo environment it will be ineffective. The conclusion shows that the optimization of the Kebumen PPID application in improving public information services has been going well but not maximally. Improvements still need to be made, because public awareness will generate public information, socialization has not gone well, and the role of PPID assistants is not very active.*

*Keywords: PPID Application, Public Information, Public Service, Optimization*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang optimalisasi aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode penentuan informan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari aplikasi PPID yaitu

Copyright (c) 2022 Agung Nurrahman, Sabaruddin Sabaruddin, Rofingatun Nur Laila Salma



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

untuk mempermudah pelayanan informasi publik khususnya kepada masyarakat Kabupaten Kebumen sehingga akan tercipta transparansi/keterbukaan informasi pemerintahan. Temuan lainnya yaitu Diskominfo Kebumen belum memiliki programmer sendiri. Hal ini menjadi kendala karena apabila terus mengundang programmer dari luar lingkungan Diskominfo akan menjadi hal yang tidak efektif. Kesimpulan menunjukkan bahwa optimalisasi aplikasi PPID Kebumen dalam meningkatkan pelayanan informasi publik sudah berjalan baik namun belum maksimal. Masih perlu dilakukan perbaikan, karena kurangnya kesadaran masyarakat akan keterbukaan informasi publik, sosialisasi belum berjalan dengan baik, dan peran PPID Pembantu yang kurang aktif.

Kata kunci: Aplikasi PPID, Informasi Publik, Pelayanan Publik, Optimalisasi

## PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi sebagai langkah untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga tercipta pemerintahan berbasis elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu inovasi dari pemerintah untuk membangun aparatur negara yang didapat dari peluang adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah pekerjaan maupun pelayanan kepada masyarakat (Amri et al., 2022). Pemerintah memberikan keleluasaan kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

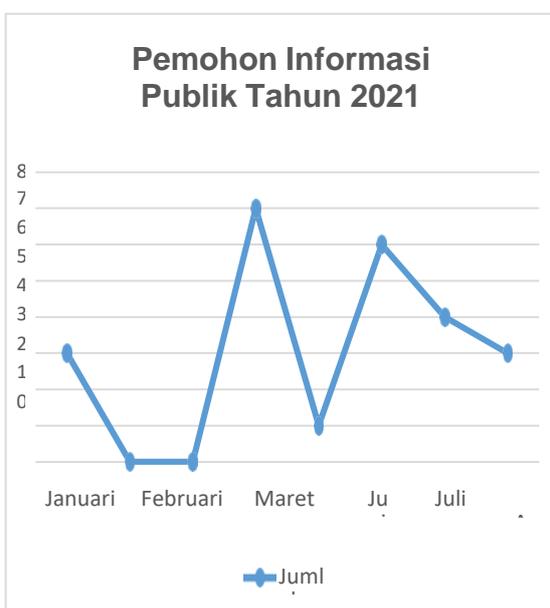
Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kebumen merupakan salah satu inovasi aplikasi berbasis website yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2019. Aplikasi ini merupakan inovasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Aplikasi PPID Kebumen dikembangkan untuk menjadi penyelenggara layanan informasi dan komunikasi publik yang unggul, transparan dan akuntabel sebagai bentuk penerapan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tiap proses terjadinya kebijakan publik. Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik beserta regulasi-regulasi turunannya telah memberikan petunjuk umum dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya seperti mengatur tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mengatur hak dan kewajiban Pemohon dan Penyedia informasi publik, dan sebagainya.

Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik secara manual membutuhkan waktu yang cukup panjang dibandingkan dengan memanfaatkan teknologi (Nasir & Rahmi, 2021). Menurut penulis, penyebab lamanya waktu yang dihadapi dalam proses manual diantaranya karena terkadang informasi yang dibutuhkan tidak hanya bertempat pada satu badan publik sehingga harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur layanan informasi pun cenderung lama. Kemudian untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya tentu menggunakan alat transportasi yang memerlukan biaya. Dan

semua itu akan memerlukan tenaga yang lebih.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sebagai PPID Utama untuk mengembangkan inovasi aplikasi PPID Kebumen yang digunakan dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Adanya aplikasi PPID membuat masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit-belit karena dilayani lewat satu pintu. Di era digital sekarang ini, dimana masyarakat dituntut untuk menerapkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, hingga saat ini masyarakat masih melakukan pelayanan informasi publik secara manual dengan datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.



Gambar 1. Pemohon Informasi Publik Tahun 2021

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, 2021

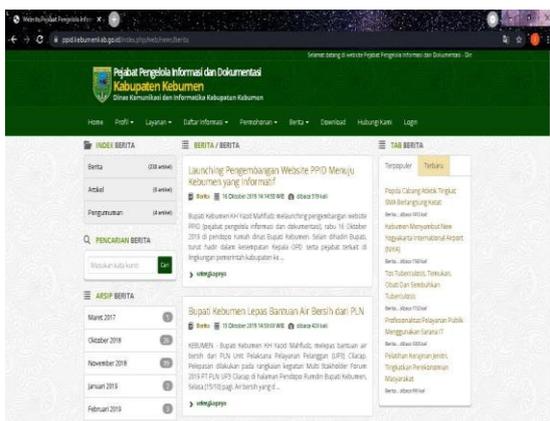
Berdasarkan data yang diberikan oleh Kasi Diseminasi Informasi dan Analisis Media Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kebumen pada tanggal 01 September 2021, pada tahun 2021 (hingga bulan Agustus), PPID Utama Kebumen mengabulkan 23 (dua puluh tiga) pemohon informasi dari 24 (dua puluh empat), 1 permintaan informasi publik ditolak karena persyaratan yang tidak lengkap. Jadi untuk mengajukan permohonan data, para pemohon diharuskan mengisi formulir informasi pemohon informasi publik yang didalamnya akan diminta data pribadi pemohon. Keengganan pemohon melengkapi formulir permohonan sering kali menjadi penyebab ditolaknya pengajuan permohonan data.

PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya dibantu oleh PPID Pembantu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Namun berdasarkan data awal yang peneliti peroleh dari Kasi Diseminasi Informasi dan Analisis Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen pada tanggal 01 September 2021 menyatakan peran PPID Pembantu OPD Kabupaten Kebumen masih belum semuanya aktif dalam mengunggah informasi/dokumen terbaru di website [ppid.kebumen.go.id](http://ppid.kebumen.go.id). Keterlambatan OPD dalam mengunggah data mengakibatkan terjadinya kekosongan data/informasi publik. Hal ini tentunya mengganggu penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Selain terjadinya kekosongan data, ketidaklengkapan data dalam website PPID Kebumen menjadi kendala selanjutnya. Pada fitur "Profil", struktur organisasi hanya terdapat gambar bagan struktur organisasi PPID Utama Kabupaten Kebumen namun tidak terdapat keterangan nama pejabat dan foto pejabat terkait. Kemudian pada fitur "Kontak Kami" yang merupakan platform

untuk mendengar suara masyarakat hanya dicantumkan alamat, nomor telepon kantor, dan surat elektronik milik Pemkab Kebumen. Tidak dicantumkan surat elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen selaku PPID Utama dan tidak terdapat faksimile.

Kemudian, pada fitur “Berita”, berita-berita yang ditampilkan belum diperbaharui. Postingan berita terakhir pada tahun 2019. Berita tersebut juga ditemukan pada website milik Pemerintah Kabupaten Kebumen ([kebumenkab.go.id](http://kebumenkab.go.id)). Hal ini menimbulkan terjadi kesamaan berita. Meski demikian, sebenarnya tidak ada korelasi yang kuat antara berita yang ada dalam website PPID Kebumen dengan pelayanan informasi publik.



Gambar 2

Fitur “Berita” pada Website PPID Kebumen

Sumber: [ppid.kebumenkab.go.id](http://ppid.kebumenkab.go.id), diakses pada 01 September 2021

Berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 pada Badan Publik di Lingkup Jawa Tengah, nilai kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam rangka pemeringkatan keterbukaan badan publik dijelaskan pada tabel 1.

Uji publik tahun 2020 khusus untuk menilai kualitas layanan informasi publik terutama keterbukaan informasi terkait penanganan Covid-19. Tabel 1. menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen cukup update dalam memberikan data perkembangan Covid-19 secara lengkap. Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/KPTS/KI-JTG/XII/2020, Kabupaten Kebumen berhasil meraih Peringkat X Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota “Menuju Informatif” dengan total poin 94,30. PPID Kabupaten Kebumen harus terus berupaya melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Bukan semata untuk menaikkan peringkat, akan tetapi keterbukaan informasi publik memang seharusnya menjadi prinsip yang mendasar bagi setiap badan publik.

Tabel 1. Nilai Kab/Kota Dalam Rangka Pemingkatan Keterbukaan Badan Publik Tahun 2020

Kab/Kota	Penilaian Tahap 1/ Informasi Wajib Berkala	Penilaian Tahap 2/ Kuesioner Penilaian Mandiri	Penilaian Tahap 3/ Verifikasi Penambahan SK Dikecualikan	Penilaian Tahap 4/ Publik Penetapan Peringkat	Total	Kategori	Peringkat
	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai			
Kota Semarang	100	99.3	95.0	98.7	98.3	Informatif	I
Kab. Demak	100	98.0	97.5	94.7	97.5	Informatif	II
Kab. Batang	100	99.3	92.5	97.8	97.4	Informatif	III
Kota Surakarta	100	100.0	90.0	98.3	97.1	Informatif	IV
Kab. Klaten	100	100.0	89.8	93.2	95.7	Menuju Informatif	V
Kab. Brebes	100	96.0	92.5	94.0	95.6	Menuju Informatif	VI
Kab. Temanggung	100	94.7	95.0	92.5	95.5	Menuju Informatif	VII
Kab. Banyumas	100	100.0	85.0	94.5	94.9	Menuju Informatif	VIII
Kab. Wonogiri	90	100.0	94.8	93.1	94.5	Menuju Informatif	IX
Kab. Kebumen	100	99.3	85.0	93.0	94.3	Menuju Informatif	X
Kab. Rembang	100	96.0	85.0	96.3	94.3	Menuju Informatif	

Sumber: kipjateng.jatengprov.go.id, diakses pada 12 Oktober 2021

Website PPID memiliki tampilan yang sederhana sehingga dipandang kurang menarik. Padahal tampilan merupakan hal pertama yang dilihat oleh masyarakat sebelum menggunakan website. Ibarat sebuah produk, produk yang bagus didukung oleh kemasan yang bagus pula. Fungsi kemasan tidak hanya untuk melindungi produk dan memberi informasi, namun juga menarik konsumen untuk memakainya. Maka, kemasan yang menarik tentunya memiliki nilai tambah bagi produk. Kemasan yang dimaksud ialah tampilan pada website. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3  
Tampilan Website PPID Kebumen  
Sumber: ppid.kebumenkab.go.id, diakses pada 01 September 2021

Gambar 3 merupakan tampilan website PPID Kebumen Terdapat beberapa alasan bahwa tampilan yang menarik pada website adalah hal yang penting. Pertama, meningkatkan kredibilitas karena dengan desain website yang menarik akan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna atau masyarakat. Kedua, memberi kesan yang baik dan kesan pertama menjadi hal yang sangat penting. Alasan selanjutnya tentu menarik masyarakat untuk mengunjungi hingga menggunakan website. Dan desain website yang menarik akan memberi nilai tersendiri bagi masyarakat. Tampilan website merupakan identitas dan semakin menarik desainnya maka semakin bagus pula nilai yang diberikan.



Gambar 4  
Tampilan Website PPID Magelang

Sumber: [ppid.magelangkota.go.id](http://ppid.magelangkota.go.id), diakses pada 01 September 2021

Website PPID Kebumen didominasi oleh satu warna, warna hijau tua sehingga terkesan monoton dan tidak ada transisi dalam website. Sedangkan website PPID Magelang memiliki berbagai warna yang cerah dan terdapat transisi dalam website sehingga membuat website PPID Magelang semakin menarik. Survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC) yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan setidaknya 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 21% sampai 36% yang

mampu mengenali hoaks. Selain mudah percaya berita hoaks, masyarakat Indonesia juga seringkali menyebarkan informasi bohong atau hoaks. Sebanyak 11,9% responden mengaku telah menyebarkan berita hoaks pada tahun 2021. Survei tersebut dilakukan pada 4 sampai dengan 24 Oktober 2021 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Apabila dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang optimal terutama dalam pengadaan informasi, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan berusaha untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dari sumber yang tidak jelas informasinya. Padahal PPID berperan sebagai garda terdepan dalam upaya menyediakan informasi pelayanan publik yang akurat dan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Sembari mewujudkan good governance diperlukan adanya peningkatan dari performance pemerintah dalam mewujudkan transparansi informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik mengerjakan penelitian berkenaan dengan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kebumen sebagai penyelenggara layanan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Kebumen. Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan masalah penelitian yaitu: bagaimana optimalisasi aplikasi PPID Kebumen dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum optimalisasi aplikasi PPID Kebumen dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

## KAJIAN TEORI

### Optimalisasi

Optimalisasi dapat didefinisikan sebagai upaya mewujudkan keadaan yang paling menguntungkan tanpa mengurangi kualitasnya. Hakikat dari definisi optimalisasi ialah yang tertinggi, yang terbaik, menjadikan paling baik, dan sebagainya. Optimalisasi merupakan cara untuk mendekati atau menyamakan hasil dari suatu usaha menjadi potensi yang dimilikinya (Kosasih & Angkowo, 2007). Optimalisasi berhubungan erat dengan upaya untuk mewujudkan kondisi yang paling menguntungkan. Keadaan tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan Siringoringo (2005), yaitu:

“Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya”.

Berawal dari teori ini maka dapat diterangkan bahwa sebenarnya optimalisasi tidak hanya sekedar upaya untuk memperoleh hasil terbaik yang memberikan banyak keuntungan ataupun laba selaras dengan apa yang diinginkan secara efektif dan efisien, akan tetapi optimalisasi juga sebagai upaya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang saat ini terjadi maupun permasalahan yang mungkin akan terjadi pada suatu proyek yang sedang berlangsung. Maka, optimalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu solusi untuk mencapai keuntungan atau hasil yang tepat tanpa harus memaksakan nilai maksimum ataupun nilai maksimum ataupun nilai minimum dari tujuan yang hendak dicapai. Sementara itu optimalisasi dalam konteks pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik

dapat dinilai dengan mengukur beberapa faktor diantaranya kepemimpinan, kelembagaan, budaya organisasi, standar pelayanan, tata kerja, pengelolaan SDM hingga pengendalian dan evaluasi (Hamzah et al., 2022).

Menurut Siringoringo (2005) terdapat 3 (tiga) elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

#### a) Tujuan

Tujuan disini dapat berupa maksimisasi atau minimisasi. Wujud dari maksimisasi dapat difungsikan bila tujuan dilaksanakannya optimalisasi berkaitan dengan profit, penerimaan, dan semacamnya. Kemudian, wujud dari minimisasi digunakan jika tujuan optimalisasi berkaitan dengan anggaran, durasi waktu, jarak dan semacamnya. Dalam menentukan tujuan dari optimalisasi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna (users) dan harus diperhatikan apa yang diminimumkan atau dimaksimalkan.

#### b) Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan adalah suatu keharusan wajib dipilih dari beberapa pilihan alternative keputusan agar tercapai tujuan yang diinginkan. Dan yang menjadi pertimbangan intinya ialah mana yang teramat menuntaskan kualifikasi dan yang paling rendah kerugiannya jika alternative tersebut dipilih. Alternative keputusan merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan agar tujuan dapat tercapai.

#### c) Sumber daya yang dibatasi

Ketersediaan sumber daya dapat mengakibatkan perlunya proses optimalisasi sehingga pemanfaatannya lebih terarah. Bentuk dari sumberdaya disini yaitu seperti fasilitas, bahan baku, maupun tenaga kerja dari manusia.

Berlandaskan penjelasan optimalisasi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan sebenarnya optimalisasi sangat berkaitan dengan upaya untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih

baik, dimana pekerjaan maupun kegiatan dapat terpenuhi selaras dengan perencanaan sebelumnya. Maka, dalam penelitian ini peneliti menetapkan teori optimalisasi menurut Siringoringo (2005) sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi fenomena-fenomena yang ada di lapangan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menetapkan informan pada penelitian ini. *Purposive sampling* adalah informan sebagai sumber data dengan mempertimbangkan yang bersangkutan memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dengan menentukan terlebih dahulu target informan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam permasalahan pada penelitian. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo, Kepala Bidang Pengelolaan Data Elektronik Diskominfo, Programmer Aplikasi, dan Masyarakat. Wawancara yang dilakukan menggunakan metode *in depth interview*. Wawancara dilakukan dengan menitikberatkan pertanyaan pada dimensi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi (Siringoringo, 2005). Selanjutnya, peneliti melakukan observasi dan dokumentasi. Peneliti menganalisis data dengan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles, M.B., & Huberman, 1984).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Optimalisasi Aplikasi PPID Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen**

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mencari tingkat terbaik dari apa yang tersaji, ketika terdapat beberapa kegiatan dalam suatu kondisi. Optimalisasi ialah pencarian supaya mendapatkan kondisi yang melepaskan nilai maksimum maupun nilai minimum dari suatu fungsi. Penulis menerapkan teori Optimalisasi menurut Hotnir Siringoringo untuk menganalisis bagaimana optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Dalam teori Siringoringo (2005) bahwa optimalisasi dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.

#### 1) Tujuan

Tujuan merupakan suatu hal mendasar yang dimiliki oleh suatu organisasi maupun perusahaan yang selanjutnya dijabarkan oleh visi dan misi. Visi berperan sebagai tujuan masa depan dan misi merupakan proses yang harus dilalui organisasi maupun perusahaan agar dapat mewujudkan visi tersebut. Salah satu elemen optimalisasi menurut Siringoringo (2005) ialah tujuan dengan konsep tujuan ialah mencakup proses maksimalisasi maupun minimalisasi. Maksimalisasi berlaku saat orientasi tujuan mencakup keuntungan, penerimaan, dan semacamnya. Sementara minimalisasi digunakan saat tujuan dari optimalisasi berkaitan dengan biaya, waktu, jarak dan semacamnya.

a) Maksimalisasi

Tujuan optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yaitu memaksimalkan keuntungan baik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dan masyarakat Kebumen. Maksimalisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen terjadi saat adanya tujuan kearah peningkatan. Bersumber pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Bapak B.S, pada hari Selasa 18 Januari 2022, beliau menyampaikan bahwa:

Tujuan adanya aplikasi PPID di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen ialah untuk mempermudah pelayanan informasi publik khususnya kepada masyarakat Kabupaten Kebumen sehingga akan tercipta transparansi/keterbukaan informasi pemerintahan. Saya rasa PPID Kebumen sudah berjalan sangat bagus karena pada tahun 2021, Kabupaten Kebumen saat KIP Award 2021 naik peringkat dari menuju informatif (tahun 2020) menjadi informatif (2021).

Tujuan dari adanya aplikasi PPID dalam pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen untuk memberikan pelayanan informasi publik sudah berjalan dengan baik. Kualitas pelayanan informasi publik berdasarkan pencapaian yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen telah meningkat. Berikut ini adalah daftar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan pada acara KIP Award 2021, yaitu:

Tabel 2.

Daftar Susunan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Kategori Informatif dan menuju informatif tahun 2021

No	Badan Publik	Nilai	Kategori
1.	Kota Surakarta	96.00	Informatif
2.	Kabupaten Demak	95.71	Informatif
3.	Kabupaten Kebumen	95.09	Informatif
4.	Kabupaten Wonogiri	94.46	Informatif
5.	Kabupaten Karanganyar	94.15	Informatif
6.	Kabupaten Batang	93.42	Informatif
7.	Kabupaten Banyumas	93.21	Informatif
8.	Kota Semarang	91.56	Informatif
9.	Kabupaten Temanggung	89.56	Menuju Informatif
10.	Kabupaten Klaten	88.96	Menuju Informatif
11.	Kabupaten Kudus	88.44	Menuju Informatif
12.	Kabupaten Wonosobo	84.40	Menuju Informatif
13.	Kabupaten Purbalingga	83.96	Menuju Informatif
14.	Kabupaten Kendal	82.96	Menuju Informatif
15.	Kabupaten Cilacap	80.85	Menuju Informatif

Sumber: [kipjateng.jatengprov.go.id](http://kipjateng.jatengprov.go.id), 2022

Pada tabel 2. diketahui bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Kebumen telah mendapatkan predikat “Informatif”. Hal ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya. Karena pada tahun 2020 Kabupaten Kebumen mendapatkan predikat “Menuju Informatif”. Meskipun belum bisa menduduki peringkat pertama, kategori “Informatif” merupakan perubahan yang besar. Dan kini Kabupaten Kebumen terus melakukan perbaikan-perbaikan agar tercipta transparansi informasi publik.

b) Minimalisasi

Selanjutnya tujuan minimalisasi dari adanya optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

didapatkan apabila terjadi penurunan materi maupun non materi yang tidak menimbulkan kerugian. Penulis mewawancarai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ibu Dewi Indri Astuti, S.P, M.M pada hari Kamis 20 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa:

Prosedur permohonan informasi publik sudah disajikan secara lengkap di website PPID yaitu secara tertulis dan menggunakan gambar. Jadi masyarakat tidak akan kebingungan dalam melakukan permohonan informasi publik. Dan dengan adanya website, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan secara langsung. Kemudian untuk informasi publik yang diminta akan langsung dikirim ke email pemohon begitu dokumen tersedia sehingga tidak memerlukan biaya pencetakan dokumen.

Tabel 3.  
Jarak Dan Waktu Tempuh Dari Kecamatan Ke Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen

No	Kec.	Jarak (km)	Waktu (menit)
1.	Ayah	43	62
2.	Buayan	26	42
3.	Puring	24	37
4.	Petanahan	16	28
5.	Klirong	11	19
6.	Buluspesantren	12	19
7.	Ambal	16	25
8.	Mirit	25	35
9.	Bonorowo	18	29
10.	Prembun	17	26
11.	Padureso	21	37
12.	Kutowinangun	9,2	16
13.	Alian	7,6	13
14.	Poncowarno	15	28
15.	Kebumen	1,2	2
16.	Pejagoan	8,5	15
17.	Sruweng	7,5	13
18.	Adimulyo	14	23
19.	Kuwarasan	20	33
20.	Rowokele	29	42
21.	Sempor	24	38
22.	Gombong	21	32
23.	Karanganyar	14	22
24.	Karanggayam	25	44
25.	Sadang	27	40
26.	Karangsambung	17	32

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

Selain mewawancarai pihak dinas, penulis juga melakukan wawancara dengan pemohon informasi, A.M, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 menyatakan bahwa:

“Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sudah cukup baik dalam menerima permohonan saya, meskipun pada awalnya saya belum memahami prosedur permohonan informasi tapi setelah saya mengakses website PPID Kebumen saya menjadi paham tentang prosedur dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan.

Kemudian, permohonan data yang saya ajukan juga cepat ditanggapi dan dalam 1x24 jam data yang saya butuhkan sudah masuk ke email saya. Jadi saya tidak perlu repot bolak-balik ke kantor diskominfo untuk mendapatkan dokumen yang saya butuhkan”.



Gambar 9  
Alur Permohonan Informasi

Sumber: [ppid.kebumenkab.go.id](http://ppid.kebumenkab.go.id),  
2022

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik berbasis teknologi, yaitu menggunakan aplikasi PPID akan menghemat waktu, biaya dan tenaga.

## 2) Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan merupakan salah satu elemen optimalisasi yang dikemukakan oleh Siringoringo (2005). Pengambilan keputusan menjadi suatu bentuk pemilihan alternatif terbaik dari banyaknya alternatif yang ada untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti. Alternatif keputusan muncul ketika terdapat dua atau lebih cara pengambilan keputusan, sehingga dalam pengambilan keputusan diperlukan cara atau alternatif lain dalam pelaksanaannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen memberikan perhatian dalam pengambilan alternatif keputusan dalam

rangka mengoptimalkan pelayanan di era digital dengan harapan keputusan yang diambil dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### a) Efektif

Setiap program yang dibuat sudah selayaknya untuk dibuat seefektif mungkin dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat, yaitu masyarakat Kabupaten Kebumen. Menurut Hidayat, efektif adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan target. Yang mana dalam penelitian ini yang menjadi targetnya adalah Masyarakat Kebumen dan yang menjadi tolak ukurnya adalah kondisi masyarakat dalam menguasai teknologi dan ketersediaan jaringan internet di Kabupaten Kebumen. Bersumber pada wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Informatika, Bapak L.R. pada hari Kamis 20 Januari 2022 diperoleh hasil yaitu:

“Setiap kali diskominfo membuat suatu program yang pertama kali dipertimbangkan adalah keadaan masyarakat, apakah sekiranya program tersebut mampu diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat secara umum. Hal ini berlaku juga bagi aplikasi PPID. Alhamdulillah untuk seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen sudah tidak ada lagi area blind spot. Jadi seluruh masyarakat yang ada di Kebumen sudah dapat mengakses internet dan hal ini ditunjang dengan tingginya penggunaan smartphone di kalangan masyarakat Kabupaten Kebumen”.

Dari pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi PPID Kebumen merupakan alternatif yang efektif karena aplikasi PPID Kebumen telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kebumen. Dimana masyarakat Kebumen yang sudah menguasai teknologi, dilihat dari tingginya angka pengguna

smartphone yang didukung dengan sinyal internet yang bagus. Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi masyarakat secara langsung penulis melakukan wawancara dengan masyarakat, Muhammad Ibrahim, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 dan diperoleh hasil:

“Saya dan seluruh anggota keluarga saya telah memiliki smartphone. Apalagi semenjak pandemi terjadi, sekolah tatap muka ditiadakan jadi adik saya yang paling kecil (SD) juga sudah memiliki smartphone. Dan untuk jaringan/sinyal internet di tempat saya tinggal sudah cukup baik, tapi tidak semua provider sinyalnya bagus. Jadi harus pandai memilih provider yang digunakan”.

Maka dapat disimpulkan bahwa alternatif keputusan yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan kondisi masyarakat Kebumen dan tentunya bernilai efektif.

#### b) Efisien

Efisien berarti suatu ketepatan cara. Cara yang dimaksud merupakan sebuah usaha atau kerja untuk menjalankan sesuatu. Cara yang digunakan untuk mengenalkan aplikasi PPID Kebumen kepada masyarakat adalah dengan sosialisasi. Untuk menunjang salah satu keputusan alternatif agar aplikasi PPID Kebumen dapat diketahui oleh seluruh masyarakat maka diperlukan sosialisasi. Muhammad Ibrahim, selaku masyarakat Kebumen menyatakan saat wawancara hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 bahwa, “Selama ini saya belum mengetahui adanya aplikasi PPID Kebumen. Jadi dalam mencari informasi publik saya langsung mencari di google ataupun media sosial milik pemerintah”.

Untuk mengkonfirmasi pernyataan narasumber di atas, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Bapak B.S, pada hari Senin 24 Januari 2022, beliau menyatakan:

“Sosialisasi aplikasi PPID Kebumen kepada masyarakat Kebumen secara umum hanya pernah dilakukan sekali saat peluncuran aplikasi yaitu tahun 2019. Karena masyarakat akan dengan sendirinya mencari dan mengetahui aplikasi PPID Kebumen jika mereka membutuhkan. Untuk tahun-tahun berikutnya sosialisasi aplikasi PPID Kebumen difokuskan kepada OPD yang ada di Kabupaten Kebumen selaku penyedia informasi. Sosialisasi aplikasi PPID Kebumen kepada OPD dilakukan paling banyak dua kali dalam setahun”.

Merujuk pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi aplikasi PPID yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen belum terlaksana secara efektif. Hal ini dilihat dari adanya masyarakat di Kabupaten Kebumen yang belum mengetahui apalagi menggunakan aplikasi PPID Kebumen.

Efisiensi suatu program dapat menjadi tolak ukur optimalnya keputusan alternatif yang diambil. Dilihat dari terlaksananya keputusan yang diambil telah sesuai dengan perencanaan tanpa mengeluarkan banyak tenaga dan biaya bahkan waktu. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ibu Dewi Indri Astuti, SP., MM, dalam wawancara pada hari Jumat 21 Januari 2022 menyatakan:

“Aplikasi PPID ini diluncurkan dengan tujuan masyarakat tidak perlu lagi kerepotan mencari informasi publik. Dengan adanya aplikasi PPID masyarakat juga tidak perlu mengantre di kantor dinas secara langsung. Jadi selain menguntungkan masyarakat, hal ini juga akan mempermudah pekerjaan pegawai *front office* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui dalam merencanakan aplikasi PPID Kebumen diharapkan akan menjadi solusi yang efisien bagi masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Hal ini juga selaras dengan realita yang terjadi saat ini. Pemohon informasi publik melalui aplikasi PPID terus meningkat sejak pertama kali diluncurkan. Bila dibandingkan dengan permohonan informasi publik secara manual, permohonan informasi publik melalui aplikasi PPID lebih mendominasi. Kemudian adanya aplikasi PPID Kebumen mampu mengefisiensikan kinerja pegawai. Ibu Dian Puspita Dewi, petugas front office Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dalam wawancara pada hari Jumat 21 Januari 2022 menyatakan:

“Tugas saya sebagai petugas *front office* di Diskominfo Kebumen sudah tidak seberat dulu. Kini banyak program pemerintah yang telah ditunjang dengan adanya aplikasi. Sehingga tidak banyak lagi masyarakat yang datang secara langsung ke kantor untuk mendapatkan pelayanan karena pelayanan sudah bisa diakses melalui aplikasi”.

### 3) Sumber Daya Yang Dibatasi

Sumber daya merupakan suatu nilai yang terdapat pada suatu materi maupun suatu elemen tertentu dalam kehidupan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Menurut Siringoringo (2005), sumber daya yang dibatasi menjadi salah satu elemen optimalisasi. Sumber daya tersebut diklasifikasikan menjadi sumber daya penunjang dan sumber daya manusia.

a) Sumber Daya Penunjang  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik tentunya membutuhkan sumber daya penunjang. Sumber daya penunjang dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang menjadi inventaris kantor. Berikut merupakan data inventaris penunjang PPID Kebumen yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, yaitu:

Tabel 4.  
Daftar Inventaris Barang Ruang Khusus Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Laptop/PC	7	Unit
2.	HP	1	Buah
3.	Printer	4	Unit
4.	Lemari arsip	2	Buah

Sumber: Laporan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kebumen, 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa sarana prasarana (barang inventaris) yang ada di ruangan khusus pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Kemudian untuk menjamin kelancaran internet untuk pelayanan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen memiliki akses internet tersendiri.

### b) Sumber Daya Manusia

Ketika sumber daya penunjang, yaitu sarana dan prasarana sudah mumpuni selanjutnya diperlukan sumber daya manusia untuk menjalankan program yang telah ditunjang fasilitas tersebut. Sumber daya manusia merupakan komponen utama karena memiliki peranan

penting dan paling dibutuhkan namun sifatnya terbatas. Keterbatasan tersebut bukan disebabkan oleh sedikitnya populasi penduduk, melainkan disebabkan oleh sedikitnya formasi pegawai dalam suatu kantor atau terbatasnya tenaga kerja yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Dalam wawancara yang penulis lakukan pada hari Selasa 18 Januari 2022 dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Bapak B.S, menyatakan: “Kami terbatas dalam hal sumber daya manusia, khususnya di bagian programmer. Diskominfo Kebumen belum memiliki programmer sendiri. Hal ini menjadi kelemahan kami karena apabila terus mengundang programmer dari luar lingkungan Diskominfo akan menjadi hal yang tidak efektif”.

Pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik ada 7 pegawai, yaitu 1 kepala bidang, 1 kepala subbagian, 1 subkoordinator, dan 4 anggota. Bidang Informasi dan Komunikasi membawahi aplikasi PPID dan banyak aplikasi lainnya, seperti yang dinyatakan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dalam wawancara pada hari Selasa 18 Januari 2022, Ibu Dewi Indri Astuti, SP., MM. yaitu:

“Aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Diskominfo Kebumen berada di bawah bidang saya. Maka dari itu saya merasa jumlah anggota di tim saya masih terbatas. Karena aplikasi yang dikelola bidang saya bukan hanya aplikasi PPID. Kerja sama dan kekompakan sangat dibutuhkan dalam tim saya. Namun aplikasi PPID ini penyedia dokumennya adalah OPD yang ada di Kebumen. Peran diskominfo dalam aplikasi PPID ialah sebagai penyalur data kepada masyarakat. Jadi menangani aplikasi PPID sebenarnya tidak terlalu membutuhkan banyak orang asalkan

OPD terkait cepat mengunggah dokumen”.

Pernyataan ini sejalan dengan wawancara kepada Kasi Diseminasi Informasi dan Analisis Media, Bapak A.A.S pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 beliau menyatakan bahwa:

“Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen memiliki tenaga pegawai yang masih kurang, apalagi di bagian programmer. Hingga saat ini, Kami hanya memiliki 2 orang programmer yang mana pegawai tersebut masih bersifat honorer atau pegawai tidak tetap. Hal ini memiliki dampak jangka panjang yaitu bilamana website PPID mengalami eror belum tentu programmer yang saat itu ada dapat menangani, karena bahasa pemrograman yang digunakan tiap programmer itu berbeda-beda”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Bidang Komunikasi dan Informasi Publik memiliki jumlah anggota yang tidak banyak. Namun hal itu tidak menyulitkan pegawai yang ada. Karena untuk aplikasi PPID sendiri, dinas tidak turun secara langsung membuat data terkait informasi publik. Tetapi, berperan dibelakang layar sebagai penyedia, penanggung jawab dan pengelola seluruh data terkait informasi publik serta semua aplikasi untuk pelayanan publik.

### **Diskusi**

Temuan penelitian berkaitan dengan tujuan dari aplikasi PPID yaitu diketahui bahwa tujuan adanya aplikasi PPID di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen ialah untuk mempermudah pelayanan informasi publik khususnya kepada masyarakat Kabupaten Kebumen sehingga akan tercipta transparansi/keterbukaan informasi pemerintahan. Salah satu alat yang dapat mewujudkan keterbukaan

informasi public adalah melalui website pemerintah daerah (Kheren et al., 2022). Pencapaian keterbukaan informasi publik merupakan kejelasan tujuan yang juga diwujudkan oleh PPID pada Sekretariat DPRD Kota Padang (Ideal, 2019). Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik melakukan input informasi yang dapat disebarluaskan kepada publik sehingga publik tidak perlu datang secara langsung ke kantor dinas terkait apabila membutuhkan informasi tertentu (Erliana et al., 2019). Melalui keterbukaan informasi publik yang dilakukan diharapkan dapat mewujudkan transparansi informasi berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah (Nurdiansyah, 2016).

Berkaitan dengan temuan utama lainnya tentang sumber daya manusia, diketahui bahwa Diskominfo Kebumen belum memiliki programmer sendiri. Hal ini menjadi kelemahan kami karena apabila terus mengundang programmer dari luar lingkungan Diskominfo akan menjadi hal yang tidak efektif. Sementara itu terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan terutama pada bidang Informasi dan Teknologi (IT) juga menjadi salah satu hambatan dalam efektifitas penerapan sistem informasi publik (Olivia, 2022). Diketahui bahwa faktor penting yang turut serta dalam pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis TI adalah faktor sumber daya manusia yang memadai (Tanaamah et al., 2021).

Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait IT dibutuhkan dalam menangani penyediaan dan pelayanan informasi public (Misnawati & Setiawan, 2021). Karakteristik sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, selain pegawai yang memiliki kemampuan IT, juga perlu memiliki tanggung jawab, integritas dan semangat tinggi menyelesaikan pekerjaannya (Febrina,

2022) . Teknologi informasi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik membutuhkan sistem informasi dan dalam pengelolaannya dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Al Astisan, 2018). Oleh sebab itu, peneliti menilai bahwa penambahan pegawai di bidang IT sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan PPID (Hananto, 2019). Melalui strategi TI yang berkaitan dengan pengembangan keahlian dari sumber daya manusia bertujuan agar TI dapat berjalan sesuai dengan harapan PPID tersebut (Tanaamah et al., 2021).

Salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan optimalisasi aplikasi adalah adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Sosialisasi sangat penting diberikan kepada masyarakat setempat. Namun, sosialisasi masih sangat kurang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen mengenai aplikasi PPID kepada masyarakat.

Setelah wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, diketahui bahwa sosialisasi aplikasi PPID kepada masyarakat secara umum hanya pernah dilakukan sekali yaitu pada saat peluncuran. Hal ini berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat akan adanya aplikasi PPID Kebumen. Minimnya pengetahuan masyarakat akan adanya aplikasi PPID Kebumen juga disebabkan kurang sadarnya masyarakat akan program- program yang dikeluarkan oleh pemerintah apalagi yang berbasis teknologi informasi. Karena masyarakat baru akan mencari tahu program terkait bila sedang membutuhkannya. Jika dirasa tidak penting atau tidak sedang dibutuhkan maka biasanya masyarakat enggan untuk mengetahui lebih lanjut program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sosialisasi merupakan faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan kebijakan keterbukaan informasi publik (Prabowo, 2014). Sosialisasi yang dilakukan dapat secara langsung tatap muka antara pemerintah dengan masyarakat dan juga bisa dilakukan secara online. Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan dengan mengundang perwakilan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Kabupaten Kebumen (Kapahang et al., 2020). Sosialisasi yang dilakukan secara langsung dapat efektif karena membuka peluang penerimaan informasi secara langsung dari pembuat kebijakan keterbukaan informasi publik sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan informasi (Herlina, 2020).

Sementara itu sosialisasi menggunakan media sosial pemerintah berperan dan berkontribusi positif dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik (Yovinus, 2018). Media sosial mampu mengkomunikasikan informasi melalui 2 (dua) arah karena media sosial dapat menjangkau partisipasi dari masyarakat (Noor, 2019). Sosialisasi melalui pembagian brosur dapat dilakukan untuk menjembatani masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan teknologi. Sosialisasi yang efektif dan efisien perlu dioptimalkan oleh pemerintah agar dapat mengoptimalkan peran serta dari masyarakat untuk menerapkan keterbukaan informasi publik (Arliman S, 2018). Sosialisasi yang efektif dan efisien perlu disertai dengan pelatihan dan pembinaan yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan aplikasi PPID. Untuk mendukung penyelenggaraan sosialisasi tersebut, perlu didukung dengan keterselesaian anggaran khusus yang memadai (Sjoraida, 2015).

Peran serta PPID Pembantu merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan aplikasi PPID Kebumen dalam mengoptimalkan

pelayanan informasi publik. Namun, pada kenyataannya peran PPID Pembantu OPD yang masih belum semuanya aktif dalam mengunggah informasi/dokumen terbaru di website [ppid.kebumenkab.go.id](http://ppid.kebumenkab.go.id). Pemahaman terhadap arti penting Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu SKPD Respon dari PPID Pembantu OPD dalam menjawab setiap permohonan informasi publik yang kurang responsif dan cepat. Hal ini menyebabkan kekosongan data informasi publik ketika diminta oleh masyarakat.

Merujuk pada hasil wawancara penelitian dijelaskan bahwa masalah yang selalu terjadi dalam PPID yaitu PPID Pembantu yang kurang cakap menyebabkan keterlambatan informasi publik. Hal ini terjadi karena tidak semua OPD memiliki bagian khusus yang menangani PPID. Sehingga terdapat pegawai yang mengemban dua tugas yang tentunya tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Selain itu belum tentu juga pegawai yang ditunjuk paham prosedur pengunggahan data-data informasi publik. Peneliti menilai bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota PPID pembantu maka dibutuhkan sosialisasi efektif kepada PPPID Pembantu tersebut, dan perlu diselenggarakan bimbingan teknis bagi PPID Pembantu (Berliani et al., 2022).

## **PENUTUP**

Proses optimalisasi sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal, karena pada ketiga dimensi dari optimalisasi masih terdapat kekurangan. Meskipun dimensi tujuan dari optimalisasi dapat dikatakan telah tercapai, namun pada dimensi alternatif keputusan masih belum bernilai optimal karena sosialisasi aplikasi PPID yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen belum terlaksana secara efektif.

Hal ini dilihat dari adanya masyarakat di Kabupaten Kebumen yang belum mengetahui apalagi menggunakan aplikasi PPID Kebumen. Berkaitan dengan dimensi sumber daya yang dibatasi, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sudah menunjukkan keberhasilan dari adanya optimalisasi.

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan informasi publik, antara lain yaitu: 1) Diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dapat memaksimalkan pelayanan informasi publik dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat selaku pemohon informasi dan OPD selaku penyedia informasi; 2) Diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lebih intensif lagi mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada PPID Pembantu OPD sehingga tidak ada lagi keterlambatan pengunggahan dokumen- dokumen; 3) Diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen untuk melengkapi dan menambah sarana dan prasarana yang kurang agar tidak menghambat proses pelayanan informasi publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Astisan, N. I. L. (2018). *Rancangan Master Plan Sistem Teknologi Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nganjuk Menggunakan Metode Ward And Peppard* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. [http://digilib.uinsby.ac.id/27805/1/Ni-ar%20Ismi%20Lafirda%20Al%20Astisani\\_H96214024.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/27805/1/Ni-ar%20Ismi%20Lafirda%20Al%20Astisani_H96214024.pdf)
- Amri, U., Adiarto, & As'ari, H. (2022). *Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4404>
- Arliman S, L. (2018). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(2).
- Berliani, C., Yulianti, R., & Supriyadi, O. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon . *JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jan.v4i1.2596>
- Erliana, Wikusna, W., & Hidayat, W. (2019). Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bandung . *E-Proceeding of Applied Science*, 5(2). <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/appliedscience/article/view/9308/9177>
- Febrina, N. (2022). *Efektivitas Pemanfaatan Website E-Ppid Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* [Institut Pemeirntahan Dalam Negeri]. [http://eprints.ipdn.ac.id/7636/1/Artike1%20Nabila%20Febrina\\_Skripsi%20FIX.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/7636/1/Artike1%20Nabila%20Febrina_Skripsi%20FIX.pdf)
- Hamzah, Yusuf, M., & Said, S. M. (2022). *Optimalisasi Pelayanan Aparatur Sipil Negara Pasca Gempa Bumi Provinsi Sulawesi Barat*. Pakalawaki Penerbitan dan Percetakan.
- Hananto, A. D. (2019). *Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kota Semarang Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)* [Undip]. <http://eprints.undip.ac.id/75257/>

- Herlina, D. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jak Publik (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, 1(1).
- Ideal, I. R. (2019). Efektivitas Kinerja Ppid Pada Sekretariat Dprd Kota Padang Dalam Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik. *R Anah R Esearc H*, 1(2). <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/43/40>
- Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/27111/26703>
- Kheren, N. N., Sazili, Sarmiati, & Arif, E. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko). *Jurnal Komunikatio*, 8(2). <https://ojs.unida.ac.id/JK/article/view/5642/2999>
- Kosasih, A., & Angkowo, R. (2007). *Optimalisasi Media Pembelajaran*. PT. Grasindo.
- Miles, M.B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage Publication.
- Misnawati, & Setiawan, H. (2021). Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Berbasis Aplikasi Ppid Dinas Komunikasi Dan Informasi Kab.Tanjung Jabung Barat. *At - Tadabbur : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 11(1). <http://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Attadabbur/article/view/252/204>
- Nasir, & Rahmi. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Pada Kantor Kelurahan Tabaringan kecamatan ujung Tanah kota Makassar. *Jurnal Mirai Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/mirai.v6i2.1936>
- Noor, M. U. (2019). Inisiasi Masyarakat Informasi Di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 7(1). <https://doi.org/10.24252/kah.v7i1a2>
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/267824618.pdf>
- Olivia, Z. (2022). *Penerapan Sistem Informasi Publik (Sip Ppid) Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Seruyan [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]*. [http://eprints.ipdn.ac.id/11201/1/ZAS KIA%20OLIVIA\\_29.1109\\_Penerapan%20sistem%20informasi%20publik%20%28sip%20ppid%29%20di%20dinas%20komunikasi%20informatika%20dan%20statistik%20kabupaten%20seruyan%20jurnal.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/11201/1/ZAS KIA%20OLIVIA_29.1109_Penerapan%20sistem%20informasi%20publik%20%28sip%20ppid%29%20di%20dinas%20komunikasi%20informatika%20dan%20statistik%20kabupaten%20seruyan%20jurnal.pdf)
- Prabowo, R. D. (2014). *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jp/article/download/5600/5401>

- Siringoringo, H. (2005). *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. . Pustaka Pelajar.
- Sjoraida, D. F. (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat . *Sosiohumaniora*, 17(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338>
- Tanaamah, A. R., Wijaya, A. F., & Maylinda, S. A. (2021). Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Sektor Publik: Penyelarasan Teknologi Informasi Dengan Visi Kepemimpinan (Studi Kasus: Kota Salatiga Dan Kabupaten Bengkayang). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 8(6).
- Yovinus. (2018). Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.47>